



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, dipandang merubah Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Situbondo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Gubernur.No.51 Tahun 2010 tentang perubahan atas Surat Gubernur Jawa Timur No. 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman Anggaran DBHCHT di Jawa Timur.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pada Bab I Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Pemerintah Kabupaten Situbondo dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.8.678.823.073,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang akan dilaksanakan oleh 12 SKPD.

2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2011 sebagaimana tersebut pada Pasal 1 merupakan sebagian dari Akumulasi Dana SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 serta Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 sebesar Rp.10.013.635.509,00 (Sepuluh Milyar Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
- (2) Selisih Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.1.334.812.436,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011.
3. Ketentuan pada lampiran I diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 05 Januari 2011

**BUPATI SITUBONDO**

ttd


**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 05 Januari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M**  
Pembina Utama muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2011.

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011**

| <b>NO.</b>    | <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)<br/>PENERIMA</b>   | <b>ALOKASI DANA</b>         |
|---------------|--|-----------------------------|
| 1.            | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah<br>- Kegiatan Monitoring, Koordinasi dan Pelaporan Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. | Rp. 82.558.823,00           |
| 2.            | Dinas Perindustrian Perdagangan<br>- Kegiatan pelatihan proses peningkatan kualitas mutu tembakau pada IHT;<br>-   | Rp. 1.484.408.100,00        |
| 3.            | Dinas Pertanian  | Rp. 1.052.685.000,00        |
| 4.            | Kantor Lingkungan Hidup  | Rp. 30.000.000,00           |
| 5.            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | Rp. 500.000.000,00          |
| 6.            | Dinas Kesehatan  | Rp. 1.496.667.650,00        |
| 7.            | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)   | Rp. 2.572.927.500,00        |
| 8.            | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  | Rp. 100.000.000,00          |
| 9.            | Satuan Polisi Pamong Praja   | Rp. 30.000.000,00           |
| 10.           | Bagian Humas Sekretariat Daerah  | Rp. 115.450.000,00          |
| 11.           | Dinas Sosial   | Rp. 823.811.000,00          |
| 12.           | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan  | Rp. 381.315.000,00          |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>Rp. 8.678.823.073,00</b> |

**BUPATI SITUBONDO,**

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011**

| No. | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penerima   | PLAFON DBHCHT<br>2011 |                         |
|-----|---|-----------------------|-------------------------|
| 1   | 2   | 3                     |                         |
| 1.  | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah  | Rp.                   | <b>82.558.823,00</b>    |
|     | - Kegiatan monitoring, koordinasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau | Rp.                   | 82.558.823,00           |
| 2.  | Dinas Perindustrian Perdagangan   | Rp.                   | <b>1.484.408.100,00</b> |
|     | - Kegiatan pelatihan proses peningkatan kualitas mutu tembakau pada IHT   | Rp.                   | 189.150.300,00          |
|     | - Pelatihan peningkatan dan pengembangan IHT dengan kadar tar dan nikotin rendah                                  | Rp.                   | 392.117.800,00          |
|     | - Peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha industry dilingkungan IHT                                   | Rp.                   | 116.174.300,00          |
|     | - Pembinaan dan fasilitasi untuk penguatan pedagang dan IHT/rokok   | Rp.                   | 143.215.300,00          |
|     | - Pengembangan Motivasi dan Produktifitas SDM IHT/rokok   | Rp.                   | 82.675.300,00           |
|     | - Pelatihan tehnik pengemasan IHT/rokok   | Rp.                   | 114.040.300,00          |
|     | - Pembinaan peningkatan dan pengembangan pasar IHT  | Rp.                   | 103.344.000,00          |
|     | - Penumbuh kembangan wirausaha baru dibidang industry dilingkungan IHT  | Rp.                   | 262.232.800,00          |
|     | - Fasilitasi pengujian kadar tar dan nikotin IHT  | Rp.                   | 81.458.000,00           |
| 3.  | Dinas Pertanian   | Rp.                   | <b>1.052.685.000,00</b> |
|     | - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna                                       | Rp.                   | 760.785.000,00          |
|     | - Pelatihan petani dan pelaku agri bisnis komoditas tembakau  | Rp.                   | 179.900.000,00          |
|     | - Pengadaan hands Sprayer   | Rp.                   | 112.000.000,00          |
| 4.  | Kantor Lingkungan Hidup   | Rp.                   | 30.000.000,00           |
|     | - Penyusunan dokumen UKL – UPL IPAL RSUD  | Rp.                   | 30.000.000,00           |
| 5.  | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi   | Rp.                   | <b>500.000.000,00</b>   |
|     | - Padat karya infrastruktur Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan/Daerah Penghasil Tembakau                       | Rp.                   | 250.000.000,00          |
|     | - Padat karya produktif (Kecamatan Arjasa) / Daerah Penghasil Tembakau  | Rp.                   | 250.000.000,00          |
| 6.  | Dinas Kesehatan   | Rp.                   | <b>1.496.667.650,00</b> |
|     | - Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)   | Rp.                   | 927.575.100,00          |
|     | - Pembangunan poliklinik akibat bahaya rokok (DBHCHT) di Puskesmas Asembagus, Besuki, Arjasa dan Panarukan        | Rp.                   | 569.092.550,00          |

| 1             | 2   | 3          |                         |
|---------------|---|------------|-------------------------|
| 7.            | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  | Rp.        | <b>2.572.927.500,00</b> |
|               | - Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DBHCT)   | Rp.        | 1.076.661.400,00        |
|               | - Pembangunan Gedung Perinatologi (DBHCT)   | Rp.        | 1.496.266.100,00        |
| 8.            | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah   | Rp.        | <b>100.000.000,00</b>   |
|               | - Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha tembakau dan industry hasil tembakau  | Rp.        | 50.000.000,00           |
|               | - Pembinaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan usaha tembakau (cukai tembakau)                                       | Rp.        | 25.000.000,00           |
|               | - Sosialisasi program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  | Rp.        | 25.000.000,00           |
| 9.            | Satuan Polisi Pamong Praja  | Rp.        | <b>30.000.000,00</b>    |
|               | - Pemantauan peredaran rokok illegal di Kabupaten Situbondo   | Rp.        | 30.000.000,00           |
| 10.           | Bagian Humas Sekretariat Daerah   | Rp.        | <b>115.450.000,00</b>   |
|               | - Sosialisasi DBHCHT  | Rp.        | 115.450.000,00          |
| 11.           | Dinas Sosial  | Rp.        | <b>832.811.000,00</b>   |
|               | - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS di daerah penghasil tembakau | Rp.        | 458.811.000,00          |
|               | - Bantuan sosial  | Rp.        | 374.000.000,00          |
| 12.           | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan   | Rp.        | <b>381.315.000,00</b>   |
|               | - Peningkatan kualitas pupuk organik  | Rp.        | 381.315.000,00          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>Rp.</b> | <b>8.678.823.073,00</b> |

**BUPATI SITUBONDO,**

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**